**BAB I**

1

**PENDAHULUAN**

1

1. **Latar Belakang**

Pendidikan dipahami sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Kaitan ini akan berasumsi bahwa maju tidaknya suatu bangsa ataupun sekala yang lebih kecil seperti komunitas manusia sangat tergantung pada pendidikan bangsa atau komunitas tersebut, jika pendidikan tersebut dapat menghasilkan manusia sebagai generasi estafet yang berkualitas lahir batin. Kondisi semacam ini, bangsa ataupun komunitas tersebut berada pada *line* yang berbanding lurus denga upaya yang dicapainya, dalam hal ini menunjukan adanya kemjuan, damai dan tentram. Namun sebaliknya, jika pendidikan suatu bangsa mengalami *stagnan*, maka bangsa itu diasumsikan akan terbelakang pada beberapa bidang bahkan lebih ekstrim lagi di segala bidang. Kaitannya mengenai kualitas sumberdaya manusia, Islam memandang bahwa pembinaan sumberdaya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri. Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumberdaya manusia, konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman.

Pada perkembanganya, dewasa ini Pendidikan Nasional tengah menghadapi isu krusial, isu sensitif terkait dengan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas, professionalisme, efisiensi, debirokrasi dan prilaku pemimpin pendidikan. Hal itu relevan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh

Muhaimin yaitu pendidikan saat ini mengalami berbagai masalah salah-satunya yaitu perilaku peserta didik yang menyimpang. Perilaku tersebut merupakan salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan.[[1]](#footnote-1) Hal tersebut masih kontradiktif dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab II pasal 3. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa:

1

1

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada bab III pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa: prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[[2]](#footnote-2)

Pada hakekatnya, berbagai upaya yang tengah kini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan tidak jarang banyaknya konsep harapan pada aspek tersebut masih mengalami ganjalan yang berbuah pada kegagalan. Adapun faktor-faktor tertentu antara lain yang dapat dicermati dari fenomena yang ada di lapangan seperti masalah penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang kurang ideal, penempatan tenaga pendidik yang kurang sesuai dengan bidang keahliaannya (termasuk di dalamnya pengangkatan kepala madrasah yang kurang professional bahkan ada indikasi mengutamakan nuansa politis dari pada profesionalisme), penanganan masalah bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan.

Mencermati berbagai masalah yang terjadi di negeri ini, pihak terkait dalam hal ini pemerintah tidak kunjung henti mencari trobosan dan solusi untuk mengentaskan permasalahan yang ada, hingga kini telah diupayakan tidak kurang dari 12 strategi pembangunan pendidikan nasional, diterangkan E. Mulyasa antara lain:

1. Menerapkan perencanaan berbasis kompetensi lokal;
2. Meningkatkan pemerataan pendidikan;
3. Menetapkan sistem manajemen mutu secara menyeluruh;
4. *Meriview* kurikulum secara preodik serta mengembangkan implementasi kurikulum secara kontinyu;
5. Merancang proses penerapan pendekatan dan metode serta isi pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada peserta didik dan warga belajar untuk mengembangkan potensi kemampuannya secara luas;
6. Meningkatkan sistem manajemen sumber pendidikan yang lebih adil dan memadai serta mendayagunakan dan memobilisasi sumber dana secara efisien;
7. Menyusun rambu-rambu kebijakan pengembangan program pendidikan yang luwes;
8. Membuat peraturan perundangan yang mengatur perimbangan peran pemerintah dan non pemerintah dalam pendidikan secara komprehensif
9. Mengurangi unit birokrasi yang dipandang kurang bermanfaat;
10. Mengupayakan secara konsisten dukungan dana yang memadai terutama untuk prioritas program pendidikan sebagai *public goods;*
11. Menjaga konsistensi dan berkelanjutan internalisasi nilai-nilai pendidikan nasional diantara tiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, dan;
12. Mengkaji pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada *life* *skill*.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami secara teoritis bahwa perkembangan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan senantiasa membutuhkan perangkat lunak yakni aspek manajemen pendidikan itu sendiri yang dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal, mulai dari tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pendidikan Islam harus mampu mengubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktivitas yang berinteraksi di dalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Karena pendidikan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang bersifat keharusan untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya sebagai manusia dalam arti yang sebenarnya. Karena begitu, urgennya masalah pendidikan bagi eksistensi manusia bagi pribadi, masyarakat dan bangsa, sehingga dalam pelaksanaannya harus melalui konsep dasar yang mantap dan harus didukung oleh manajemen yang rapi, teratur dan sistematis serta dilaksanakan oleh orang-orang yang professional dan penuh tanggung jawab. Diterangkan Sudarman Damin bahwa:

Hal itu sejalan dengan tujuan pendidikan yang biasanya menghantarkan para siswa menuju pada perubahan tingkah laku. Perubahan itu tercermin baik dari segi intelek, moral maupun hubungannya dengan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut siswa dalam lingkungan sekolah akan dibimbing dan diarahkan oleh guru maupun siswa yang dituntut berperan aktif[[4]](#footnote-4).

Saat ini Madrasah memiliki kesempatan yang lebih luas dan lebih bebas dalam mengembangkan lembaga pendidikannya. madrasah tidak lagi bicara masalah hak penyelenggaraannya, karena haknya telah diakui sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di samping itu diatur juga di dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang jenjang dan penyelenggaraan pendidikan Madrasah, bab III pasal 11, antara lain berbunyi sebagai berikut :

­Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke-tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.

Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan amanat peraturan pemerintah di atas, tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa sekarang ini pendidikan keagamaan non forman dan informal dihargai sederajat dengan pendidikan formal. Penyetaraan ini sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti atau menuntaskan pendidikan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar bagaimana kualitas pendidikannya. Sampai saat ini rendahnya kualitas SDM menjadi tanggung jawab bersama, hal tersebut telah menjadi berita rutin. Setiap keluar laporan *Human Development Index*, posisi kualitas SDM anak didik selalu berada di bawah. Salah satu penyebab rendahnya kualitas hidup manusia adalah kualitas pendidikan yang rendah. “Kualitas sosial ekonomi dan kualitas gizi-kesehatan yang tinggi tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan berkualitas”[[6]](#footnote-6).

Sementara ada profil madrasah unggulan hanya dilihat dari karakteristik prestasi yang tinggi, ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana madrasah yang besar, kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan madrasah yang kesemuanya sudah unggul. Wajar saja bila bahan masukannya bagus, diproses di tempat yang baik dan dengan cara yang baik pula maka keluarannya otomatis bagus. Sebenarnya disebut unggul apabila masukan biasa-biasa saja atau kurang baik tetapi diproses ditempat yang baik dengan cara yang baik pula sehingga keluarannya bagus. Oleh karena itu, “penyelenggaraan Madrasah unggulan harus segera direstrukturisasi agar benar-benar bisa melahirkan manusia unggul yang bermanfaat bagi Negeri ini”[[7]](#footnote-7).

Langkah strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan implementasi menejemen yang baik pada madrasah. Beberapa aspek yang membutuhkan manajemen, yaitu manajemen sarana-prasarana, tenaga pendidik, kependidikan, keuangan, peserta didik, dan kurikulum. Jadi beberapa unsur tersebut merupakan elemen dasar di dalam lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, dalam menerapkan menagemen harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Managemen merupakan seni memperoleh hasil melalui kegiatan yang dilakukan orang lain.[[8]](#footnote-8) Jadi dapat dipahami bahwa dalam lembaga pendidikan tentunya ada yang mengendalikan pendidikan (kepala madrasah). Untuk mewujudkan tujuan utama maka madrasah harus memanfaatkan sumber daya yang ada melalui seni mengelola lembaga pendidikan.

Salah-satu elemen dasar dalam lembaga pendidikan yang memiliki peran penting adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik atau biasa dikenal dengan guru sedangkan tenaga kependidikan dikenal sebagai orang yang membantu berjalannya lembaga pendidikan seperti kepala madrasah, dan staff administrasi. Untuk meningkatkankan mutu madrasah maka perlu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.

Menajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum termuat dalam Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa:

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, dan (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.[[9]](#footnote-9)

Adapun kegiatan menejemen tenaga pendidik dan kependidikan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, motivati dan pengawasan. Kegiatan perencaan meliputi langkah strategis seperti pengadaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Setelah ditetapkan rencana strategis kedepan, maka selanjutnya diorganisasikan agar sesuai dengan perencaan yang telah dibuat. Selain itu *stakeholder* juga memiliki peranan memberikan motivasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan agar kinerjanya dapat ditingkatkan. Untuk menguatkan tugas tenaga pendidik dan kependidikan maka harus dilakukan pengawasan agar terarah sesuai dengan rencana.

Jika menejemen tenaga pendidik dan kependidikan tidak diterapkan akan timbul berbagai masalah. Masalah yang timbul menjangkiti pendidik dan tenaga kependidikan adalah tingkat sumberdaya manusia yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta yang terjadi di lapangan bahwa guru yang berada di *remote area* atau daerah terpencil kemungkinan terbesar tidak bisa mengaplikasikan IT dengan baik. Padahal penggunaan IT dewasa ini merupakan sarat mutlak perkembangan zaman, sehingga jika guru ingin maju maka harus menguasai IT dengan baik. Selain itu, diberbagai daerah guru hanya sebatas mengajar tetapi tidak memberikan bimbingan sehingga perilaku anak banyak yang menyimpang karena hanya dilakukan pengembangan aspek kognitif saja tanpa memperhatian aspek psikomotrik dan afektif.

Sama halnya dengan sering berubahnya kurikulum pendidikan, dari KBK ke KTSP, atau dari KTSP ke kurikulum 2013 juga mempengaruhi *performance* guru dalam mengajar. Banyak guru diberbagai daerah yang susah menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum, sehingga mutu diberbagai sekolah terpencil tidak dapat mengikuti perkembangan. Tentunya hal ini, menjadi masalah yang serius dan perlu dipikirkan kembali oleh pemangku kekuasaan. Untuk mengatasi masalah di atas, tentunya perlu penerapan managemen di madrasah gunanya untuk menggerakan tenaga pendidik dan kependidikan agar bekerja dengan sebaik mungkin.

Berkaitan dengan hal itu, Madrasah Tasnawiyah Negeri 02 Konawe Selatan juga mengalami hal yang sama. Untuk wilayah madrasah ini merupakan madrasah yang jauh dari pusat perkotaan sehingga akses pengetahuan baru seperti perubahan kurikulum berjalan lambat. Begitu pula jaringan internet masih belum ada selayaknya sekolah yang berada di kota atau di pusat perkotaan. Padahal jaringan internet juga membantu percepatan perbaikan pendidikan. Berdasarkan fakta tersebut, akan tetapi tidak mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia di madrasah ini. Terbukti dari lulusannya para siswa dapat bersaing dengan madrasah lainnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa dengan keterbatasan fasilitas tetapi tenaga pendidik dan kependidikan masih dapat selalu meningkatkan kinerjanya atau berinovasi semaksimal mungkin.

Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat madrasah ini menjadi objek penelitian dengan judul *Implementasi Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan.*

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas yang terbatas;
2. Wilayah madrasah yang jauh dari pusat perkotaan;
3. Minimnya jumlah tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya;
4. Perubahan kurikulum yang mempengaruhi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan.

**B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama,* implementasi manajemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. *Kedua,* faktor pendukung dan penghambat implementasi manejemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. *Ketiga,* upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasai faktor penghambat implementasi manajemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi garapan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar lebih terarah berjalan pada sasaran yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi manajemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasai faktor penghambat implementasi manajemen pengembagan tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan?

**D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah tafsir pada judul penelitian ini, maka penulis mencoba menguraikan satu-persatu. adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen

Implementasi manajemen maksudnya adalah penerapana kegiatan-kegiatan manajemen pada lembaga pendidikan. adapun kegiatan-kegiatan manajemen tersebut terdiri dari *planning, organizing, motivating* dan *controlling* dan *evaluating.*

1. Tenaga pendidik dan kependidikan

Tenaga pendidik yang dimaksudkan adalah guru yang mempunyai tugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan dan mengevaluasi. Sedangkan maksud dari tenaga kependidikan adalah staf (tata usaha, laborat, dan pustakawan). Unsur tersebut merupakan elemen penting yang membantu ketercapaian pelaksanaan proses pendidikan.

Berdasarkan paparan definisi di atas, secara oprasional yang penulis maksudkan dengan judul *“Implementasi Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Konawe Selatan”* adalah penerapan seluruh fungsi manajemen sebagai upaya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan.

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasai faktor penghambat implementasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan.

**2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberikan seperangkat pemahaman serta pengembangan konsep manajemen pendidikan Islam khusunya dalam lingkungan Madrasah di Konawe Selatan yang lebih ideal diterapkan berdasarkan karakter dan kebutuhan lembaga pendidikan dengan tuntutan kemajuan ilmu dan zaman.

b. Manfaat Praktis

Secara prakrtis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak antara lain: *Pertama*, bagi para penentu kebijakan khusunya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait seperti Kementrian Agama, Madrasah, atau Kepala Madrasah, penelitian ini dapat dijadikan data atau informasi atau acuan sebagai sampel penelitian melihat betapa pentingnya sebuah implementasi manajemen pendidikan Islam sebagai cara yang lebih ideal diterapkan.

*Kedua*, Secara khusus bagi pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Konawe Selatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan sekaligus salah satu peluang untuk mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dalam mencetak kader bangsa yang lebih unggul dengan kemampuan emosional spiritual (ESQ), dan intelektual (IQ).

*Ketiga*, bagi masyarakat pada umunya dan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun penulis lain yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini pada obyek yang lebih faktual, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan kepustakaan.

1. Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 159 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,* (Yogayakarta: Media Wacana Press, 2003), h. 2 & 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 132 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudarman Damin, *Media Komunikasi Pendidikan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 79 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Pemerintah nomor 55 tentang jenjang dan penyelenggaraan pendidikan Madrasah, bab III pasal 11tahun 2007 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurkolis, “*Sekolah Unggulan yang Tidak Unggul”*, dalam http:// www.Schoolparent Camberra.Net.au/effective, Schools (22 Januari 2015) [↑](#footnote-ref-6)
7. Moedjiarto, *Karakteristik Sekolah Unggul* (Jakarta: Duta Graha Pustaka, 2002), h. 94 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mustafa Husba, *Aplikasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Formal,* (Makassar: PT. Pustaka Nusantara Padaidi, 2005), h. 19 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, *Op.Cit.,* h. 6 [↑](#footnote-ref-9)